

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diuraikan bahwa pendapatan negara adalah seluruh pendapatan yang bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Menurut Undang Undang No.24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diuraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pendapatan Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda Provinsi DKI Jakarta), Pendapatan Asli Daerah yang diterima pada tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah sebesar 70,76%, 73,37%, dan 66,95% serta Pendapatan Pajak Daerah yang diterima pada tahun 2018, 2019, dan 2020 sebesar 61,30%, 64,68% dan 57,07% dari keseluruhan pendapatan daerah yang diterima. Maka dari itu, Pendapatan Asli Daerah khususnya Pendapatan Perpajakan Daerah dapat disebut sebagai tiang penyangga untuk keberlangsungan ekonomi daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2007 tentang, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemda Provinsi DKI Jakarta mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemda Provinsi DKI Jakarta juga berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan kondisi khusus yang diterima Pemda Provinsi DKI Jakarta, maka Pemda Provinsi DKI Jakarta menjadi mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Dapat dilihat dari penerimaan keseluruhan pendapatan daerahnya yang lebih didominasi oleh komponen pendapatan asli daerah dibandingkan dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta pendapatan lainnya yang berupa pendapatan hibah. Berdasarkan LKPD tahun 2018, 2019, dan 2020 Pendapatan Asli Daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta lebih besar 231,43 %, 314,10% dan 220,56% jika dibandingkan dengan Transfer ke Daerah dan Dana desa, dan lebih besar 22 kali lipat, 22 kali lipat, dan 24 kali lipat jika dibandingkan dengan pendapatan hibah. Dalam kasus ini, Pemda Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan pemerintah daerah lainnya yang masih bergantung pada TKDD dan pendapatan lainnya berupa pendapatan hibah.

Pemda Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan asli daerah tertinggi di Indonesia (Kusnandar Viva, 2019). Dalam pemungutan pendapatan, Pemda Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada PP no 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan APBD tahun 2018,2019 dan 2020 Pendapatan Asli Daerah Pemda Provinsi DKI

Jakarta berkontribusi sebanyak 15,8%, 15,5% dan 14,1% dari keseluruhan pendapatan asli daerah di Indonesia. Untuk mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan asli daerah, Pemda Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama satu periode. Laporan keuangan kemudian digunakan sebagai ukuran kinerja suatu lembaga dengan menilai kesehatan dan kepatuhan keuangannya, serta sebagai bentuk transparansi bagi publik dan pemangku kepentingan. Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengacu pada standar akuntansi yang diatur pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dikarenakan Pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia pada tahun 2020, pemerintah membuat kebijakan baru untuk mengatur stabilisasi negara sebagaimana tercantum pada PP No. 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamat Ekonomi Nasional. Kebijakan baru ini membantu memulihkan keadaan ekonomi di Indonesia, namun pendapatan daerah yang di terima Pemda Provinsi DKI Jakarta menjadi berkurang.

Berdasarkan data pada APBD tahun 2019 dan 2020, penerimaan pendapatan asli daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 18,14%. Perbandingan pendapatan asli daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 dan 2020 terlampir pada lampiran 1 dan lampiran 2.

Karena pendapatan asli daerah yang diterima Pemda Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup besar, penulis tertarik untuk menganalisis penerimaan pendapatan pada tahun pandemi Covid-19 dengan sebelum pandemi. Oleh karena itu, penulis ingin menulis Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah yang terdapat pada karya tulis tugas akhir ini :

1. Bagaimana klasifikasi pendapatan asli daerah pada Pemda Provinsi DKI Jakarta? (kalau mau masukin klasifikasi di gambaran umum objek)
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 terhadap pendapatan asli daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana implementasi akuntansi pendapatan asli daerah di Pemda Provinsi DKI Jakarta ?
4. Apakah penerapan akuntansi pendapatan asli daerah di Pemda Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan penulisan atas rumusan masalah yang timbul :

1. Mengetahui jenis pendapatan asli daerah yang diterima Pemda Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengetahui dampak pandemi Covid-19 yang ditimbulkan terhadap pendapatan asli daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta.
3. Mengetahui penerapan akuntansi pendapatan asli daerah di Pemda Provinsi DKI Jakarta.
4. Mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan akuntansi pendapatan asli daerah di Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan kebijakan akuntansi dan peraturan yang berlaku.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Pada karya tulis ini, penulis menentukan ruang lingkup pembahasan berupa perbandingan LKPD khususnya pada pendapatan asli daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada saat Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dengan pendapatan asli daerah yang diterima 2 tahun sebelumnya. Dari perbandingan tersebut, penulis akan menganalisis mengapa terdapat perbedaan pendapatan saat pandemi Covid-19. Selain itu, penulis juga akan meninjau kesesuaian penerapan akuntansi Pendapatan pada Pemda DKI Jakarta dengan SAP dan peraturan lain yang terkait.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan pada karya tulis ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang akuntansi pendapatan asli daerah dan dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

## 2. Manfaat Praktik

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yakni :

- a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan serta memiliki gambaran akuntansi penerimaan pendapatan asli daerah dan dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan asli daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta.
- b) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi gambaran bagaimana pandemi Covid-19 dapat memengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dan bagaimana cara mengatasi dampak atas wabah tersebut.
- c) Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada rakyat dan atau kepada stakeholder dan atau kepada pemangku kepentingan lainnya yang membutuhkan informasi terkait dampak yang diterima pendapatan asli daerah atas pandemi Covid-19.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memperkenalkan gambaran umum karya tulis berikut, dengan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan tulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun karya tulis tugas akhir.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis umum dan khusus yang akan digunakan untuk penyusunan karya tulis yang terdapat pada beberapa sumber, antara lain dari buku-buku, jurnal, dan beberapa pendapat umum maupun pendapat para ahli serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema karya tulis ini, yaitu pendapatan asli daerah.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan metode yang akan digunakan untuk menulis karya tulis ini. metode yang digunakan nantinya untuk mencari data dan fakta tentang topik yang akan dibahas pada karya tulis ini. Maka pada bagian ini, penulis akan membahas penerimaan asli daerah di Pemda Provinsi DKI Jakarta dan juga menganalisis perbedaan besar penerimaan pendapatan antara tahun 2020 selama masa pandemi Covid-19 dengan 3 tahun ke belakang.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan penulis dari analisis bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini, penulis berharap dapat menjelaskan dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan asli daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta.